

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

a. Capaian Inflasi Provinsi Jawa Timur pada Triwulan IV 2021 mencapai 2,45 % (y on y), lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV 2020 dengan capaian sebesar 1,44% (y on y), serta lebih tinggi dari capaian Triwulan III 2021 yang sebesar 1,92%(y on y). Demikian juga, capaian inflasi Jawa Timur pada Triwulan IV 2021 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional 1,87%(y on y). jika dilihat lebih detail, dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang diukur maka sumbangan inflasi Jawa Timur selama tahun 2021 dipengaruhi oleh tekanan pada 10 (sepuluh) kelompok pengeluaran yaitu; (1) kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 5,04%, (2) kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 3,60%, (3) kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 3,17% (4) kelompok Kesehatan 3,09%, (5) kelompok Pendidikan 2,56%, (6) kelompok Transportasi 2,25%, (7) kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 2,22%, (8) kelompok Pakaian dan Alas Kaki 2,05%, (9) kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 1,09%, (10) kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0,77%,. Sedangkan sumbangan deflasi terjadi pada 1 (satu) kelompok pengeluaran, yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,09 %.

b. Sampai dengan TW IV 2021 capaian inflasi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi tahunan ini masih sesuai dengan target pemerintah yang mematok target inflasi pada rentang sasaran sebesar $3 \pm 1\%$, meskipun masih terdampak pandemi Covid-19 namun secara aggregate demand di Jawa Timur telah mengalami pemulihan peningkatan daya beli dibanding dengan tahun 2020 sebelumnya. Capaian inflasi Jawa Timur ini juga sesuai dengan proyeksi TPID Provinsi Jawa Timur yang cenderung lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi pada Triwulan III 2021. Peningkatan inflasi Jawa Timur terutama dipengaruhi oleh momen menjelang peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang terkonfirmasi dari tingkat sumbangan inflasi tahunan didominasi pada kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dan kelompok Bahan Makanan, Minuman dan Tembakau sebagaimana tersebut sebelumnya. Selain itu tekanan inflasi terjadi sejalan dengan mulai pulihnya kinerja perekonomian dengan pelonggaran pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sehingga terjadi peningkatan permintaan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Sinergi antar stakeholder dalam mengendalikan pandemi Covid-19 Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik meskipun terdapat temuan khusus varian baru Omicron pada akhir tahun 2021 tetapi sejauh ini mampu diantisipasi dengan baik, hal ini menjadikan tingkat percaya diri/konfiden dari pelaku ekonomi semakin kuat yang tercermin melalui peningkatan aktivitas perekonomian yang mulai bangkit, sehingga efeknya juga berpengaruh pada semakin terjaganya daya beli masyarakat. Indikasi tersebut dapat dilihat dari tingkat inflasi Jawa Timur pada tiga bulan berturut-turut di tahun 2021 yang selalu mengalami tren peningkatan positif (Oktober 0,18% (m to m), Nopember 0,35% (m to m), Desember 0,69% (m to m)).

c. Pada Triwulan IV 2021, dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis. TPID Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan langkah-langkah mitigasi dan responsif telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Jawa Timur, antara lain:

- Ketersediaan Pasokan dengan melaksanakan kegiatan : i. Upaya mendorong peningkatan produksi peternakan melalui kegiatan vaksinasi flu burung (Avian Influenza); ii. Upaya peningkatan produksi komoditi pertanian dengan penggunaan benih bersertifikat, unggul dan bermutu; iii. Upaya peningkatan produksi pangan melalui intensifikasi dan peningkatan indeks pertanaman; iv. Upaya pemetaan lahan tanaman pangan dari segala potensi resiko (organisme pengganggu tanaman/OPT, dampak perubahan iklim/DPI); v. Optimalisasi program Tanam, Petik, Olah, Kemas, Jual (TPOKJ);
- Keterjangkauan Harga dengan melaksanakan kegiatan antara lain : i. Penguatan BUMD Jawa Timur (PT. JGU/PT. Puspa Agro) sebagai intermediary

komoditas strategis dalam menjaga stabilitas harga misalnya pada komoditas Telur dan Jagung; ii. Penguatan kerjasama antar daerah (KAD) sebagai upaya serap - distribusi komoditas strategis untuk mengeliminasi disparitas harga dengan kegiatan Misi Dagang serta pemanfaatan inovasi digital dan pemantauan arus distribusi melalui Sistem Perdagangan Antar Pulau (SIPAP); iii. Promosi dan upaya mencari area pemasaran baru hasil pertanian dan peternakan Jawa Timur mengikuti kegiatan Misi Dagang; □ Kelancaran Distribusi dengan melaksanakan kegiatan i. Percepatan perbaikan infrastruktur jalan penghubung dibawah kewenangan provinsi untuk mendukung serta memperluas akses dan kelancaran distribusi; ii. Optimalisasi pemanfaatan pelabuhan-pelabuhan yang dikelola dan di bawah kewenangan provinsi; iii. Subsidi tarif angkutan kapal darang dan penumpang untuk penyeberangan wilayah kepulauan; iv. Optimalisasi double track jalur KAI untuk angkutan barang di jalur selatan; □ Komunikasi Efektif dengan melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD)/rapat koordinasi/ rapat teknis antara lain : i. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah tahun 2021, pada tanggal 14 Oktober 2021, dengan hasil rekomendasi antara lain dengan meningkatkan intensitas diskusi/rapat teknis TPID Provinsi Jawa Timur yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan kinerja pengendalian inflasi. Mengoptimalkan sarana sistem aplikasi berbasis website dalam peningkatan kedisiplinan pelaporan secara online melalui www.jaimreport.jatimprov.go.id dan www.siskaperbapo.jatimprov.go.id . Serta dengan memperkuat program unggulan pengendalian inflasi Jawa Timur melalui Lumbung Pangan Nusantara dengan didukung ekosistem digitalisasi UMKM pertanian dan pangan; ii. Melaksanakan rapat evaluasi kebijakan intermediary supply-demand komoditas strategis, menindaklanjuti arahan Bapak Plh. Sekretaris Provinsi Jawa Timur, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, dengan hasil rekomendasi rapat untuk menindaklanjuti telaah permasalahan pembiayaan intermediary supply-demand komoditas strategis dengan mencari alternatif pembiayaan dengan bunga yang terjangkau secara kelayakan bisnis untuk menjalankan program sebagaimana dimaksud dengan rentang biaya bunga antara 6% s.d 8% per-tahun. Serta sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas mandatory ini dengan mengusulkan konsep/rancangan Peraturan Gubernur intermediary untuk mendapat masukan yang konstruktif dan komprehensif; iii. Melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut kebijakan intermediary supply-demand, menindaklanjuti arahan Bapak Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dengan hasil rekomendasi rapat bahwa skema penyertaan 4 modal untuk program intermediary supply-demand adalah agar disesuaikan dengan pertimbangan hasil rapat dan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil rapat dimaksud, saat ini skema pembiayaan melalui penyertaan modal tidak dimungkinkan karena membutuhkan waktu untuk persetujuan DPRD yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Alternatif skema pembiayaan lainnya adalah sinergi antar BUMD Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini dengan PT. Bank Jatim dan PT. Bank UMKM. Selain itu, PT. JGU dapat melakukan pinjaman dengan lembaga jasa keuangan lain sesuai dengan kelayakan bisnis. Selain itu, PT. JGU agar segera berkonsultasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, sebagai anggota TPID Jawa Timur untuk memperoleh alternatif solusi pembiayaan dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis di Jawa Timur; iv. Mengatur langkah sinergi dengan OPD teknis terkait dengan pemenuhan data yang up to date dan complying kelengkapan data, misalnya melalui pelayanan informasi harga komoditas peternakan dengan memanfaatkan aplikasi www.simponiternak.pertanian.go.id dan <http://pusatkkp.bkp.pertanian.go.id/simonstok/> . d. Inflasi IHK Jawa Timur pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, namun tetap terkendali dalam sasaran inflasi 3,0%+1% (y on y). Perkiraan ini sejalan dengan potensi berlanjutnya perbaikan permintaan domestik yang ditopang oleh semakin terkendalinya pandemi dengan akselerasi perluasan akses vaksinasi

Covid-19 sejalan dengan harapan agar masyarakat untuk tidak lengah dan senantiasa menjaga protokol kesehatan Covid 19 mendorong semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif yang berimplikasi pada kenaikan mobilitas masyarakat dan mendorong peningkatan permintaan. Semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif diperkirakan turut mendorong kenaikan pendapatan masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier. Hal tersebut diperkirakan berdampak pada peningkatan inflasi IHK Jawa Timur, khususnya untuk kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; Pakaian dan Alas Kaki, Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar; Transportasi; dan Pendidikan. Upaya Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan akses transportasi dalam rangka memperluas konektivitas di Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan tantangan disparitas harga antar daerah serta pengendalian inflasi.

e. Inflasi inti (core), diperkirakan cenderung naik seiring dengan pemulihan tren peningkatan aktivitas ekonomi global dan domestik pada tahun 2021. Kenaikan harga komoditas, seperti batu bara, gas, minyak mentah, nikel, dan crude palm oil (CPO). Peningkatan harga impor bahan 5 baku dan bahan penolong yang disebabkan oleh masih adanya disrupsi logistik perdagangan global sejalan dengan akselerasi ekonomi global. Sementara itu, potensi tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh harga minyak dunia yang diproyeksikan lebih rendah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. International monetary fund (IMF) memproyeksikan harga minyak mentah dunia pada tahun 2022 sebesar USD63,11 per barel atau lebih rendah dibandingkan rata-rata tahun 2021 yang diperkirakan sebesar USD64,64 per barel. Hal ini diperkirakan menjadi faktor penahan inflasi, khususnya untuk sub kelompok bahan bakar.

f. Sedangkan kelompok inflasi dari harga yang diatur pemerintah (administered price) pada tahun 2022 mendatang akan diprediksi cenderung naik dibandingkan dengan tahun 2021. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh rencana peningkatan cukai rokok pada tahun 2022 serta penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) non-subsidi sesuai harga keekonomiannya yang diperkirakan turut meningkatkan laju inflasi. Potensi normalisasi berbagai harga pasca berakhirnya insentif pajak pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan turut mendorong peningkatan inflasi indeks harga konsumen (IHK) Jawa Timur. Perbaikan peningkatan masyarakat serta potensi penyesuaian tarif berbagai komoditas yang diatur oleh pemerintah diperkirakan meningkatkan tekanan inflasi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar serta kelompok Transportasi. Permintaan masyarakat yang diperkirakan mulai mendekati pola normal sebelum pandemi sejalan dengan semakin luasnya pembukaan sektor produktif berpotensi mendorong peningkatan mobilitas masyarakat sehingga berimplikasi pada kenaikan permintaan kelompok Transportasi dan sub kelompok Bahan Bakar. Sejalan dengan semakin baiknya pemulihan ekonomi domestik, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap berbagai insentif yang sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2020-2021 saat pandemi Covid-19. Subsidi listrik yang diberikan kepada seluruh sektor rumah tangga dengan daya 450 VA s.d 6.600 VA pada tahun 2021 diperkirakan mengalami penyesuaian. Tarif listrik kelompok rumah tangga dengan daya di atas 1.300 VA akan kembali mengikuti harga keekonomiannya sehingga berdampak pada peningkatan inflasi. Tekanan inflasi kelompok Pendidikan juga akan meningkat seiring dengan masuknya normalisasi kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun 2022. Pemulihan kegiatan perekonomian dan percepatan vaksinasi bagi kalangan pelajar diperkirakan turut mendorong normalisasi kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka di lingkungan pendidikan. Dengan adanya kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM), institusi pendidikan mengalokasikan anggaran tambahan dalam rangka mendukung pelaksanaan protokol kesehatan serta pengadaan alat-alat kesehatan yang berdampak terhadap adanya kenaikan terhadap biaya pendidikan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan data berita rilis statistik (BRS) inflasi oleh BPS kelompok pengeluaran yang menyumbang inflasi terbesar pada tahun kalender Triwulan IV 2021 antara lain pada (1) kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 5,04% (y to d), (2) kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 3,60 (y to d), (3) kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,17% (y to d). Jika dilihat secara bulanan komoditas penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Timur pada bulan Oktober antara lain: Minyak Goreng 0,03% (m to m), Rokok Kretek Filter 0,02% (m to m), Daging Ayam Ras 1,82%(m to m), pada bulan November antara lain : Telur Ayam Ras 0,08%(m to m), Minyak Goreng 0,06%(m to m), Pepaya 0,02% (m to m), dan pada bulan Desember antara lain: Cabai Rawit 0,19%(m to m), Angkutan Udara 0,09%(m to m), Minyak Goreng 0,06%(m to m). Beberapa identifikasi faktor pendorong dan faktor penahan inflasi antara lain : a. Faktor pendorong inflasi tahun 2021 □ Adanya vaksin Covid-19 diperkirakan akan meningkatkan permintaan masyarakat; □ Potensi peningkatan minyak mentah sejalan dengan peningkatan mobilitas di tengah program vaksinasi yang terus dilakukan diberbagai negara; □ Peningkatan upah minimum kab/kota (UMK) wilayah Jawa Timur; □ Peningkatan tarif angkutan udara dan tarif tol di wilayah Jawa Timur; □ Kebijakan Kementerian Keuangan berupa kenaikan harga cukai rokok sebesar 12,5% pada tahun 2021; □ Potensi gangguan cuaca dari La Nina di tengah musim hujan menyebabkan intensitas hujan yang lebih tinggi dan mengganggu proses produksi. b. Faktor penahan inflasi tahun 2021 □ Optimalisasi kerjasama antar daerah melalui perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pasokan antar daerah surplus-defisit; □ Sinergi dan koordinasi aktif TPID dalam upaya pengendalian harga serta menjaga ekspektasi masyarakat; □ Kebijakan dan stimulus fiskal pemerintah pusat dan daerah untuk lapangan usaha pada sektor industri, sektor perdagangan dan sektor pertanian dapat menahan laju peningkatan harga produk jadi, serta kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menahan nilai tukar rupiah pada level yang aman dan terjaga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian laju inflasi oleh TPID Provinsi di Jawa Timur pada Triwulan IV 2021 tetap berfokus pada strategi roadmap 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif). Untuk menjaga sasaran inflasi sesuai dengan target $3 \pm 1\%$ sampai dengan akhir tahun 2021, maka pada periode kuartal IV ini telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk pengendalian inflasi yang mengacu pada strategi 4K antara lain: a. Ketersediaan Pasokan, 1) Gubernur Jawa Timur mendampingi Presiden RI meresmikan Bendungan Tugu di Trenggalek dan Bendungan Gongseng di Bojonegoro, bendungan Tugu memiliki kapasitas tampung 12 juta m³ dan memberikan manfaat irigasi seluas 1.250 Ha sedangkan bendungan Gongseng memiliki daya tampung 22 juta m³ dan bisa mengairi 6.200 Ha, dengan adanya bendungan ini diharapkan dapat mereduksi banjir dan menjadi sarana irigasi lahan pertanian, peresmian bendungan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 secara hybrid baik luring dan daring. 2) Gubernur Jawa Timur mendampingi Presiden RI meresmikan Pasar Besar Ngawi, dengan adanya Pasar Besar Ngawi diharapkan mampu menjadi pengungkit pergerakan ekonomi pada masyarakat Ngawi dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19, peresmian dilakukan pada tanggal 17 Desember 2021. b. Keterjangkauan Harga 1) Gubernur Jawa Timur menghadiri pembukaan Pameran Jatim Fair 2021, pada tanggal 8 Oktober 2021. Jatim Fair merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun dalam rangka untuk memperingati dan memeriahkan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, pameran ini diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk UMKM kepada masyarakat. Kemudian juga untuk memotivasi dan meningkatkan

transaksi dagang selama dan sesudah pameran. Selain itu kegiatan ini juga sebagai sarana peningkatan daya saing dan menyampaikan informasi yang efektif efisien tentang potensi, prestasi, reputasi kinerja kementerian, lembaga, dinas, instansi pemerintah, pihak swasta, BUMN, BUMD kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Kemudian sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi Jawa Timur. 2) Gubernur Jawa Timur meresmikan kegiatan Misi Dagang dan Investasi dengan Provinsi Maluku pada tanggal 2 Desember 2021, selama kegiatan berlangsung tercatat transaksi sebesar 232,74 miliar, dengan kegiatan perdagangan antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku. Secara aggregate tercatat total transaksi pembelian Provinsi Maluku ke Provinsi Jawa Timur sebesar 2,43 triliun dan transaksi dari Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Maluku sebesar 251 miliar antara lain untuk komoditas tembaga, ikan beku dan kayu balok; 3) Gubernur Jawa Timur melaksanakan sidak pasar terkait pengendalian harga kebutuhan bahan pangan menjelang HBKN NATARU di pasar Tambak Rejo Surabaya, pada tanggal 24 Desember 2021. Gubernur memastikan stok kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) aman, cukup, dan terkendali.

c. Kelancaran Distribusi 1) Gubernur Jawa Timur bersama dengan Forkopimda Jawa Timur meninjau kontijensi kesiapan penanggulangan bencana alam tahun 2021, dalam menghadapi dampak La Nina dan Hidrometeorologi yang diprediksi terjadi November 2021 sampai Februari 2022, bertempat di lapangan Kodam V Brawijaya pada tanggal 25 Oktober 2021; 2) Gubernur Jawa Timur meresmikan Dermaga Movable Bridge IV dengan rute Ketapang - Banyuwangi menuju Lembar - Lombok Barat. Dermaga ini menjadi salah satu cara Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendorong percepatan kegiatan ekonomi dan pariwisata, sekaligus menunjang kelancaran operasional penyeberangan dari Pulau Jawa ke Indonesia Bagian Timur, dilaksanakan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi pada tanggal 26 Oktober 2021; 3) Gubernur Jawa Timur memantau proses evakuasi banjir bandang di kota Batu, yang dilaksanakan di Kota Batu pada tanggal 4 November 2021. Pada kegiatan tersebut Gubernur Jawa Timur juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan terhadap fenomena La Nina yang diprakirakan mencapai puncaknya di penghujung tahun 2021; 4) Gubernur Jawa Timur memantau rumah Pompa Sungai Kamoning, saat debit air tinggi dan memastikan semua peralatan bisa beroperasi dan berfungsi dengan baik, sehingga bisa mengurangi resiko meluapnya banjir di kawasan sekitar Kabupaten Sampang, pemantauan di laksanakan di Sampang pada tanggal 13 November 2021; 5) Gubernur Jawa Timur melakukan peninjauan lokasi guguran awan panas (APG) Gunung Semeru Lumajang dan percepatan upaya penanganannya, dimana terdapat sebagian besar rumah warga yang tertimbun awan panas guguran (APG), dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2021; 6) Gubernur Jawa Timur meninjau lokasi Jembatan Gladak Perak bersama Bupati Lumajang dan Danlanud Abd. Shaleh pada tanggal 6 Desember 2021. Dalam upaya menyiapkan jembatan darurat menyambungkan koneksitas antara Pronojiwo dan Candipuro sebagai solusi sementara, sambil menunggu penanganan secara permanen; 7) Gubernur Jawa Timur melakukan peresmian Dermaga Movable Bridge II Jangkar Situbondo pada tanggal 19 Desember 2021, dermaga ini merupakan salah satu aset yang dikelola di bawah UPT Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat meningkatkan konektivitas dan akses ke beberapa daerah kepulauan di Kabupaten Sumenep yaitu Pulau Raas, Sepudi, Kangean dan Kalianget hingga bisa meningkatkan sektor ekonomi, pendidikan, sosial dan berbagai sektor lainnya; 8) Gubernur Jawa Timur meninjau daerah terdampak gempa di Kecamatan Ambulu, serta melaksanakan susur jalur evakuasi Pantai Papuma dan Watu Ulo di Kabupaten Jember pada tanggal 18 Desember 2021. Daerah sepanjang pantai selatan Jawa Timur adalah daerah rawan gempa dan tsunami. Karenanya pemerintah daerah agar memperkuat mitigasi bencana dan menyiapkan rencana aksi dengan berbagai skenario; 9) Gubernur Jawa Timur melaksanakan peninjauan persiapan angkutan NATARU pada tanggal 24

Desember 2021. Dalam rangka persiapan angkutan menjelang NATARU, termasuk didalamnya dilakukan tes urine bagi sopir dan kondektur bus antar kota dan antar provinsi di terminal Bungurasih Purabaya yang dilakukan oleh Polda Jatim untuk titik keberangkatan dan Polresta Sidoarjo untuk titik kedatangan untuk melindungi penumpang agar aman dan nyaman selama perjalanan; 10) Gubernur Jatim memantau Terminal Penumpang di Gapura Surya Tanjung Perak pada tanggal 24 Desember 2021 persiapan angkutan NATARU dari aspek memprioritaskan keselamatan penumpang untuk angkutan laut. d. Komunikasi Efektif 1) Gubernur Jawa Timur memimpin rapat percepatan vaksinasi sebagai antisipasi Covid-19 varian baru dan sekaligus persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2021 di wilayah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Forkopimda Provinsi Jawa Timur dan 38 Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan di kota Surabaya pada tanggal 17 November 2021.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh TPID Provinsi Jawa Timur pada periode s.d Triwulan IV 2021 telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut tercermin dari terjaganya tingkat inflasi di Jawa Timur yang berada pada level rentang target (3 ± 1) sebesar 2,45 % (y on y), meskipun berada diatas capaian inflasi Nasional yang sebesar 1,87% (y on y). Tantangan pengendalian inflasi pada Triwulan IV 2021 lebih kepada pengendalian harga pada kelompok volatile food dan administered price sejalan dengan makin longgarnya aktivitas kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat serta pemulihan ekonomi menuju JATIM Bangkit yang berjalan pada jalur/track-nya yang tercermin pada pulihnya permintaan masyarakat di komoditi penyumbang inflasi sepanjang tahun 2021, antara lain : a. Minyak Goreng b. Tarif Jalan Tol c. Akademi/ Perguruan Tinggi d. Angkutan Udara e. Rokok Kretek Filter f. Sayur Sop g. Tahu Mentah h. Cabai Rawit i. Semangka j. Daging Sapi Dalam rangka mitigasi dan mempersiapkan strategi pengendalian harga/ inflasi agar tetap stabil khususnya pada komoditas strategis penyumbang inflasi, peran TPID Provinsi Jawa Timur tetap berada dalam koridor untuk memperkuat strategi utama 4 K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) melalui berbagai agenda kegiatan Rapat Teknis dan Rapat Koordinasi, High Level Meeting (HLM) – Refleksi Akhir Tahun 2021 Bertema “Optimis Jatim Bangkit: Pengendalian Inflasi Dalam Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan”, aktivitas pengendalian harga di lapangan seperti Sidak Pasar, Kunjungan Pasar, Pasar Murah Online, Operasi Pasar, dan Pemantauan Harga, serta Optimalisasi Teknologi Informasi melalui aplikasi <https://jaimreport.jatimprov.go.id/>, www.siskaperbapo.com, dan www.poskodigitalatgaspangan.net dalam mendukung penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan tepat waktu. Kebijakan stimulus fiskal dilaksanakan melalui percepatan dan efektifitas realisasi APBD Provinsi Jawa Timur diharapkan menjadi pemicu dan pemacu pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat Jawa Timur sehingga membuat aktivitas perekonomian menjadi meningkat yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan ekonomi yang berdampak pada menjaga pemulihan daya beli masyarakat Jawa Timur. TPID Provinsi Jawa Timur menjaga momentum pemulihan ekonomi pada Triwulan IV 2021 disertai dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil serta terjaga sesuai dengan rentang target Nasional yang telah ditetapkan sebesar $3\pm 1\%$.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Peningkatan laju inflasi yang terkendali dapat dimaknai sebagai indikator perekonomian yang kembali menguat dan pulih, Namun demikian, Provinsi Jawa Timur tentu akan menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil pada tahun 2022 mendatang. Tantangan pengendalian inflasi akan bersumber dari sisi eksternal (normalisasi

suku bunga the fed, kenaikan harga komoditas global, disrupsi rantai pasok) maupun internal (penerapan pajak karbon menuju green industry dan green economy yang berpotensi meningkatkan tarif dasar listrik, potensi bencana alam akibat La Nina yang berakibat pada turunnya produksi hasil pertanian serta terjadinya gangguan distribusi). Juga dengan masih adanya potensi ketidakpastian kapan berakhirnya masa pandemi Covid-19 (khususnya dengan potensi munculnya varian-varian baru, misalnya Delta, Omicron, dll). Ditengah tantangan dan ketidakpastian ini, perlu disusun strategi pada Tahun 2022 yang antara lain adalah: a. Respon cepat, sinergi dan kerja keras pemerintah dalam menghadapi potensi penanggulangan dampak kebencanaan yang mengancam produksi komoditas strategis sangat mutlak diperlukan; b. Penguatan dan optimalisasi program JATIM Lumbung Pangan Nusantara sebagai aggregator hasil produksi komoditas strategis; c. Penguatan dan revitalisasi peran BUMD JATIM dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi; d. Pemberdayaan distribution center UMKM pertanian dan pangan melalui sinergi dengan kelembagaan pesantren yang mendapat dukungan dari berbagai stakeholder terkait misalnya Perum Bulog; e. Penguatan program ketahanan pangan daerah kabupaten/kota melalui pola-pola diversifikasi pangan di Jawa Timur; f. Inovasi pemanfaatan teknologi digital dalam menjaga inflasi dan daya beli masyarakat kedepan melalui berbagai upaya dan strategi penguatan mitigasi resiko inflasi yang dimaksimalkan lebih lanjut dengan digitalisasi rantai pasok yang terintegrasi. Hal ini tentu akan mendorong ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi yang lebih baik. g. Peningkatan peran kantor perwakilan dagang (KPD) dalam penguatan arus distribusi dan konektivitas; h. Peningkatan kualitas, validitas, kesesuaian dan ketepatan waktu penyampaian data perkembangan harga (melalui portal PIHPS dan SISKAPERBAPO); i. Optimalisasi dan implementasi Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (SIPAP); j. Pemanfaatan Early Warning System (EWS-Data Statistik Pertanian, Data Harga, Data Ketersediaan Stock) komoditi strategis sebagai dasar untuk melaksanakan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi resiko inflasi/deflasi. Sebagai contoh pengoptimalan aplikasi <https://jaimreport.jatimprov.go.id/> yang telah disusun oleh Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur selaku sekretariat TPID Provinsi Jawa Timur.